

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki kewenangan menguji konstusionalitas peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait uji konstusionalitas Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang diajukan oleh Almas Tsaqifbirru jelang Pemilu 2024. Pada putusan-putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menguji pasal *open legal policy* tersebut dan menyerahkannya kepada lembaga legislatif. Kemudian pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang untuk menguji pasal tersebut dan mengesampingkan *open legal policy* pasal *a quo*. Pasca pengesampingan *open legal policy* tersebut kemudian muncul permohonan gugatan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta beberapa permohonan uji konstusionalitas kepada Mahkamah Konstitusi terhadap putusan *a quo*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus *open legal policy* berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta implikasi hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 disahkan.

Hasil penelitian menunjukkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji pasal *open legal policy* jika melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang intolerable, seperti yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Di sisi lain, tidak terdapat implikasi hukum pasca putusan *a quo* karena pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga tidak terdapat mekanisme hukum untuk mengubahnya termasuk melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi maupun melalui pengajuan permohonan baru untuk menguji putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

**Kata Kunci** : Mahkamah Konstitusi, *Open Legal Policy*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.